

**PELAKSANAAN DESENTRALISASI
DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA SAWAHLUNTO**
(Studi Kasus Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Pada Jenjang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Dalam memperoleh gelar Magister Sains
Pada Pasca Sarjana Universitas Andalas

Oleh:

NOVENDRA HIDAYAT

BP. 08 212 02 060



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Pengelolaan Pendidikan Di Kota Sawahlunto
(Studi Kasus Pelaksanaan MBS Pada Jenjang Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto)
Oleh: Novendra Hidayat
(Dibawah bimbingan Dr. Sri Zul Chairiyah, MA dan Dr. Azwar, M.Si)

Ringkasan

Penyelenggaraan pendidikan menekankan peran lebih Pemerintah Kota/Kabupaten dalam pengelolaannya. Peran Pemerintah Kota/Kabupaten ini sendiri menjadi penting mengingat prinsip desentralisasi pendidikan dikuatkan dengan keberadaan aturan hukum seperti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meletakkan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara utama satuan pendidikan. Penyelenggaraan otonomi daerah dalam hal desentralisasi pendidikan ini menghendaki pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik, dan pembangunan daerah juga dapat lebih terarah dengan semakin baiknya sumber daya daerah yang ada. Di Kota Sawahlunto, dalam hal pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan terlihat masih belum dilaksanakan dengan optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan di Kota Sawahlunto khususnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang pendidikan menengah, yang menggunakan konsep Desentralisasi, Manajemen Pendidikan, dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif desain studi kasus deskriptif analisis dan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan khususnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang pendidikan menengah saat ini masih perlu disempurnakan lagi agar lebih optimal. Dalam upaya pelaksanaannya, dilaksanakan tahapan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan SDM, proses belajar-mengajar, dan sumber daya administrasi. Selain itu, dilaksanakan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang Berbasis Sekolah, dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemko Sawahlunto masih mengupayakan melaksanakan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan sendiri dalam hal ini merupakan prioritas utama dalam pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2008-2013. Pemko Sawahlunto saat ini melaksanakan "tiga pilar pembangunan pendidikan." Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Program Peningkatan MBS merupakan salah satu program Dinas Pendidikan. Sebagai salah satu bentuk desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, dilaksanakannya MBS diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Sawahlunto di setiap jenjang pendidikan.

Kata Kunci Penelitian : Desentralisasi, Manajemen (Pengelolaan) Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar pembangunan bangsa disamping pembangunan sumber daya alam dan teknologi. Dalam pembangunan sumber daya manusia, pendidikan merupakan salah satu sektor strategis yang perlu menjadi fokus perhatian. Hal ini mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia (Ahmad Ali Riyadi, 2006). Dengan demikian kualitas sumber daya manusia tergantung dari kualitas pendidikannya, oleh karena itu berbagai inovasi harus perlu terus dilakukan pemerintah agar kualitas pendidikan semakin meningkat.

Dalam hal pendidikan, kebijakan yang harus dimiliki pemerintah terhadap warga negaranya adalah menyediakan pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Berbagai aturan hukum telah mensyaratkan kewajiban ini untuk dilakukan pemerintah seperti tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UUD 1945 amandemen keempat Pasal 31 dan Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003.

Pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat disebutkan salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Senada dengan hal tersebut dalam UUD 1945 amandemen keempat yakni pasal 31 (1) dan (2) menyatakan bahwasannya setiap warga negara wajib

untuk mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Dalam pasal 31 (4) UUD 1945 amandemen keempat juga disyaratkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi sektor pendidikan minimal 20 persen dari total keseluruhan anggaran, baik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bermakna pengakuan adanya daerah otonom dan sekaligus pengakuan/penyerahan wewenang, hak, dan kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang tertentu dari Pemerintah kepada Daerah. Termasuk pula di dalamnya berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, dimana terdapat perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.

Penyelenggaraan otonomi pendidikan ini dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan tentang pergeseran paradigma pendidikan nasional, dari *education for all* (pendidikan untuk semua) menjadi *education from all, by all, and for all* (pendidikan dari semua, oleh semua dan untuk semua) (Sirozi, 2005).

Education for all berarti akses pendidikan bagi semua masyarakat memang terbuka lebar, tetapi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kota Sawahlunto saat ini masih mengupayakan pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan sendiri dalam hal ini merupakan prioritas utama dalam pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2008-2013. Pemerintah Kota Sawahlunto pada saat ini melaksanakan "tiga pilar pembangunan pendidikan." Tiga pilar pembangunan pendidikan tersebut adalah: (a) peningkatan kualitas pendidikan, (b) perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan (c) penguatan tata kelola, akuntabilitas, citra publik pendidikan melalui efisiensi manajemen pendidikan.
2. Pelaksanaan desentralisasi dalam hal pengelolaan pendidikan khususnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada jenjang pendidikan menengah di Kota Sawahlunto saat ini masih perlu disempurnakan lagi agar lebih optimal. Hambatan kecil seperti rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan pendidikan di sekolah dapat disiasati dengan adanya komitmen bersama dan keinginan belajar yang tinggi seluruh komponen sekolah agar MBS dapat lebih berhasil lagi.
3. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Program Peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu program Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto dalam rangka pelaksanaan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

4. Dalam mengupayakan pelaksanaan MBS, SMA Negeri 1 Sawahlunto sebagaimana konsep MBS melaksanakan empat tahapan, yakni tahap perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). SMA Negeri 1 Sawahlunto mengusahakan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), proses belajar-mengajar, dan sumber daya administrasi dalam upaya pelaksanaan MBS.
5. Dalam upaya peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), SMA Negeri 1 Sawahlunto sebagai salah satu jenjang pendidikan menengah di Kota Sawahlunto melaksanakan: (1) Manajemen Pelayanan Pendidikan yang Berbasis Sekolah, dan (2) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Diperlukan strategi baru dalam pelaksanaan MBS di Kota Sawahlunto ke depannya. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS
 - b. Membangun budaya sekolah (*school culture*) yang demokratis, transparan, dan akuntabel.
 - c. Pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi.
 - d. Mengembangkan model program pemberdayaan sekolah.

B. Saran

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Sawahlunto perlu terus mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan di Kota Sawahlunto. Disamping itu, inovasi dan kreatifitas seluruh pihak terkait baik Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, maupun sekolah juga sangat dibutuhkan agar mampu mamaknai pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan di Kota Sawahlunto.
2. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai suatu bentuk desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan perlu ditingkatkan lagi dengan dibantu pembimbingannya oleh Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, agar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini dapat dilaksanakan secara optimal di setiap jenjang pendidikan di Kota Sawahlunto.
3. Partisipasi aktif dari masyarakat kota, komitmen, dan semangat kebersamaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan pendidikan di Kota Sawahlunto. Apalagi dalam hal pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), keberhasilannya sangat didukung dengan adanya komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.
4. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menganjurkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan desentralisasi pendidikan ke depannya di Kota Sawahlunto dalam kaitan ini adalah faktor apa yang mendorong ataupun menghambat pelaksanaan MBS sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Kota Sawahlunto.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Ali Riyadi. *Politik Pendidikan, Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Ar-Ruzz. Yogyakarta, 2006.
- Afriani. *Kinerja Program Dinas Pendidikan Di Era Otonomi Daerah (Kasus Pada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi)*, Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Unand. 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002.
- Chan, Sam M. dan Tuti T Sam. *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Cresswell, John W. *Research Design, qualitative and Quantitative Approaches*, Jakarta, KIK Press.
- Fadila. *Identifikasi Pelaksanaan Program Kerja Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Desentralisasi Pendidikan (Studi Kasus Pada Jenjang Pendidikan Menengah Di Kota Sawahlunto Periode 2006)*. Skripsi pada Jurusan Ilmu Politik Unand Padang. 2007.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kabullah, M. Ichsan. *Bias Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Provinsi Jambi*. Tesis pada Program Studi Magister Administrasi Publik UGM. 2009.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Grasindo, 2005.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 01 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.
- PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan